



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Presiden akan bentuk komisi reformasi Polri
Tanggal	: Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Presiden Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri

Rencana Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri sedang ramai dibahas. Rencana ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR, tapi mendapat catatan kritis dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres), terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Yusril, mengatakan, tim yang tergabung dalam Komisi Reformasi Polri itu akan dilantik dalam waktu dekat.

"Belum (ada target), kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya (tim) sehari dua hari ini, dia kita lihatlah dalam Keppresnya itu ada berapa langkah dilakukan untuk menyelarasinya dengan rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan

bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian.

"Merumuskan perubahan-perubahan dan syarat-syarat itu, (lalu) akan diserahkan kepada Presiden nantinya," ujarnya.

Selanjutnya, kata Yusril, hasil rumusan tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Yusril menambahkan, undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu, sudah harus dievaluasi kembali.

"Dengan menyesuaikan keadaan sekarang, dan tuntutan dari rakyat untuk melaksanakan reformasi Kepolisian kita," ucap dia. Belakangan waktunya lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa akan dibentuk tim atau komisi reformasi Kepolisian. Peraturan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) selama tiga jam, sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendukung langkah Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri ini. Dia menyakini, apa yang dilakukan Prabowo, merupakan yang terbaik untuk institusi Polri.

"Selaku Kepala Negara, pasti beliau yang paling paham apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki dalam Institusi Kepolisian," ujar Rudianto kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (17/9/2025).

Sementara itu, Peneliti ICJR Ifthatsari mewanti-wanti, agar Komisi Reformasi Polri ini bukan hanya formalitas saja. Dia berharap, orang-orang yang berada di Komisi Reformasi Polri memiliki kompeten.

"Kami masih belum tahu komponen timnya seperti apa, pembentukan apakah transparan, apakah diisi oleh orang-orang yang berkeinginan, kompeten," ujar Ifthatsari kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (17/9/2025).

Untuk mengetahui pandangan dari Rudianto Lallo dan Ifthatsari mengenai pembentukan Komisi Reformasi Polri, berikut wawancaranya.

IFTITAHSAARI

Peneliti ICJR

Kami Berharap Timnya Tak Sekadar Formalitas



“

Kalau bisa tim ini punya *work plan* yang jelas, nggak cuma selesaikan kasih rekomendasi, terus dituruti rekomendasi tersebut di atas meja janya Presiden.



RUDIANTO LALLO

Anggota Komisi III DPR

Presiden Tahu Apa Yang Perlu Dibenahi

Apa catatan Anda terkait rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri?

Sebenarnya, ICJR dan kami punya Komisi Reformasi Polri (KRP) sudah lama menyuarakan itu. Kebutuhan reformasi Polri ini sudah ada sendiri. Nah, ketika reformasi ini memang datang, maka tim reformasi khusus Polri atau bagaimana, itu sebetulnya yang kami pertanyakan dari teman teman koalisi.

Memang kenapa?

Karena kami melihat, kalau misalkan di timnya hanya sekedar formalitas dan tidak berfungsi yang seluruh sebenarnya, ya jadiinya nggak berdampak juga kan.

Berdasarkan indikator, misalnya di timnya hanya sekedar formalitas dan tidak berfungsi yang seluruh sebenarnya, ya jadiinya nggak berdampak juga kan.

Jadi kalau kami masih melihat lagiih, komponen timnya seperti apa, pengetahuan spakardya seperti apa, apakah diisi oleh orang-orang yang berintegritas, kompeten, dan yang penting nggak punya konflik kepentingan.

Anda menilai orang-orang yang ada di tim Komisi Reformasi Polri ini bagaimana?

Ia yang nanti akan menentukan arah yang akan dibasiskan oleh tim tersebut. Apakah cuma jadi normatif saja, atau benar-benar *impactful* dan memberi dampak. Nah itu yang kami kritik di situ.

Kalau misalnya nggak ada jaminan itu, ya buat apa. Sebenarnya, yang kita perlukan itu reformasi Polri nya, bukan *gimmick gimmick* pembentukan timnya.

Menurut Anda, siapa yang cocok menjadi anggota tim Komisi Reformasi Polri?

Berdasarkan indikator, misalnya bagaimana seperti apa. Apakah punya kompetensi atau keahlian untuk menggalih dan melihat jernih sebuah masalah sistem.

Jadi harus seperti apa anggota timnya?

Orang yang paham birokrasi, pa-

ham HAM dan paham bagaimana *security policy* dalam negara.

Jadi punya kompetensi itu harus dijamin. Kemudian yang paling penting adalah nggak punya konflik kepentingan dan berintegritas.

Itu yang kita cari, ya, untuk agar mantan mantan pegawai Polri di situ.

Kalau menelaah ngecepati apa-

nya makna dan tujuan itu supaya

tahu dalamnya seperti apa, birokrasi seperti apa, segala macam. Namun menurut kami, nggak harus mereka langsung di dalam.

Seharusnya bagaimana?

Bisa jadi *reviewer*nya atau men-

buat rapor, atau membuat informasi dan bukti untuk membuktikan diri.

Jadi hal ini yang sebetulnya harus paling penting untuk dihindari. Sehingga apa yang mereka rekomendasikan,

Bagaimana Anda melihat rencana Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri?

Kami menghimbau dan mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri. Karena Presiden selaku Kepala Negara, beliau yang paling tahu.

Maknudanya?

Yang kita cari, itu merupakan institusi alat negara, di bawah keamanan ketertiban masyarakat. Berugas melayani, mengayomi, melindungi me-

syarakat, dan serta penegakan hukum.

Kami setuju dalam rangka tanggungjawabnya untuk perubahan atau

perbaikan ke arah yang lebih baik.

Lantas, hal apa saja yang perlu direformasi?

Ada banyak hal yang mungkin terkait dengan bagaimana strukturnya, kulturanya, dan strukturnya dalam Polri. Seperti bagaimana dalam rangka wewenang fungsi dan tugas Polri, sesuai-paimana dalam konstitusi Pasal 34, tentu saja kami sendiri mendukung upaya-upaya dalam rangka perbaikan tersebut. Kira-kira begini.

Selain ini Anda melihat kinerja Polri seperti apa?

Polri itu de facto gas tugas. Polri seperti menjalani, mengayomi, melindungi masyarakat. Itu akanjadi pertanyaan. Apakah selama ini Polri jalannya mengayomi, melindungi ma-

nuhnya dan berkomunikasi masih kurang? Kalau masih kurang, ayo kita perbaiki.

Selain itu, apa lagi yang harus

direformasi?

Apakah selama ini banyak gen-jalan politik yang misalkan tidak dihormati diikuti misalkan neoprene seperti judi online, narkoba, korupsi yang belum efektif, apakah itu yang perlu direformasi? Jika perlu, maka harus meminta anggota Polri yang berintegritas tinggi. Serta kunci-kunci dan komitmen dalam peningkatan hukum.

ICJR berharap pembentukan Komisi Reformasi Polri bukan hanya *gimmick* saja, namun benar-benar melakukan pembenahan di institusi Polri, apa tanggapan Anda?

Tentu Presiden punya niat baik, punya keinginan memperbaiki institusi Polri. Presiden yang paling palingnya yang paling talk apa yang pentingnya, dan yang tidak pentingnya.

Kita serahkan kepada Pemerintah.

Pasalnya, Presiden sebagai Kepala Negara ditopang dua alat negara, yaitu TNI dan Polri. ■ NNM